



RENCANA STRATEGIS BALAI DIKLAT LHK MAKASSAR 2020 - 2024



BALAI DIKLAT LHK MAKASSAR



bdlhkmakassar



@bdlhkmakassar



Balai Diklat LHK Makassar



Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 17.5, Makassar
Telp. (0411) 55457, Fax. (0411) 554535
Email : bdkmksr@gmail.com

<http://bdlhkmakassar.org/>



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
MAKASSAR

Jalan Perintis Kemerdekaan Km.17,5 Kotak Pos 1397 Tlp. 554875, Fax. 554535

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MAKASSAR
Nomor : SK. 61/BDLHK-6/SPKD/REN.0/10/2020

Tentang

**TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN MAKASSAR TAHUN 2020 - 2024**

KEPALA BALAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024 dinyatakan bahwa Unit Kerja Eselon II atau UPT wajib menyusun Rancangan Renstra Unit Kerja Eselon II atau UPT dengan berpedoman pada Renstra Unit Kerja Eselon I ;
- b. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut implementasi program dan kegiatan Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 – 2024 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.7/P2SDM/SET/REN.0/9/2020, perlu disusun dokumen Rencana Strategis Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Tahun 2020 – 2024 guna mendukung pencapaian target kinerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Tahun 2020 - 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar selaku Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu menetapkan Rencana Strategis Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4452);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919);
11. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.7/P2SDM/SET/REN.0/9/2020 tentang Rencana Startegis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MAKASSAR TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MAKASSAR TAHUN 2020 - 2024.

Kesatu : Rencana Strategis Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Tahun 2020 – 2024 sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Strategis Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Tahun 2020 – 2024 disusun untuk dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tahunan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 26 Oktober 2020
Kepalai Balai,



Dr. Edi Sulistyo H. Susetyo, S.Hut, M.Si
NIP. 197012062000031004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Sekretaris Badan dan Kepala Pusat lingkup Badan P2SDM;
6. Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan di seluruh Indonesia;
7. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KATA PENGANTAR

Sumber daya manusia (SDM) lingkungan hidup dan kehutanan harus dapat menjawab berbagai tantangan yang semakin berat antara lain kompetisi di pasar global, peningkatan aneka fungsi kehutanan dan jasa lingkungan, pendidikan dan kesadaran lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut dibutuhkan strategi secara berkelanjutan untuk membina dan mengembangkan SDM lingkungan hidup dan kehutanan yang tangguh dan kompetitif. Salah satu langkah strategis untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan menyusun dan mengembangkan program-program diklat lingkungan hidup dan kehutanan sejalan dengan permasalahan yang semakin kompleks dan tuntutan yang terus berkembang.

Untuk menjawab berbagai permasalahan kaitannya dengan tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar menyusun langkah strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024. Rencana Strategis Balai Diklat LHK Makassar mengacu pada target RPJMN tahun 2020 – 2024 yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024 dan juga merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2020 – 2024.

Semoga Rencana Strategis Balai Diklat LHK Makassar Tahun 2020-2024 dapat menjadi *road map* untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM lingkungan hidup dan kehutanan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kekuatan bagi kita semua dalam mengemban amanah dan tugas mulia dalam mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan melalui pengembangan SDM lingkungan hidup dan kehutanan.



Kepalai Balai,

Dr. Edi Sulistyo H. Susetyo, S.Hut, M.Si
NIP. 197012062000031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	7
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024	17
2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK	17
2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program BP2SDM	20
BAB III. KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN	22
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Balai Diklat LHK Makassar	22
3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan Balai Diklat LHK Makassar	23
3.3. Pengarusutamaan	24
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	27
4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Balai Diklat LHK Makassar (<i>cascading</i>)	27
4.2. Target Kinerja	29
4.3. Kerangka Pendanaan	30
BAB V. PENUTUP	33
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matrik Kinerja dan Pendanaan Program, Kegiatan dan Komponen	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Balai Diklat LHK Makassar	2
Gambar 2.	Grafik Pagu dan Realisasi Anggaran Balai Diklat LHK Makassar 2015 – 2019	4
Gambar 3.	Peserta Diklat Berdasarkan Kelompok Gender Pada BDLHK Makassar Tahun 2015 – 2019	6
Gambar 4.	Distribusi Pegawai Balai Diklat LHK Makassar Tahun 2019 ...	7
Gambar 5.	Ilustrasi Kapasitas Asrama dan Mess Balai Diklat LHK Makassar Tahun 2019	8
Gambar 6.	Grafik Nilai Aset dan Penyusutannya Tahun 2015 – 2019	9
Gambar 7.	Kondisi Aset Balai Diklat LHK Makassar Tahun 2019	9
Gambar 8.	Peta Kawasan Hutan Diklat Tabo-Tabo, Kab. Pangkep	11
Gambar 9.	Peta <i>Cascading</i> Terkait Balai Diklat LHK Makassar 2020 – 2024	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rencana dan Realisasi Diklat Pada Balai Diklat LHK Makassar Tahun 2015 – 2019	5
Tabel 2.	Fasilitas/Sarana kediklatan Balai Diklat LHK Makassar di Kampus Sudiang, Makassar	10
Tabel 3.	Fasilitas/Sarana Kediklatan Balai Diklat LHK Makassar di Kampus Hutan Diklat Tabo-Tabo, Kab. Pangkep	10
Tabel 4.	Strategi Pencapaian Sasaran Kegiatan	13
Tabel 5.	Identifikasi Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)	14
Tabel 6.	Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Klasifikasi Rincian Output (KRO) Balai Diklat LHK Makassar	22
Tabel 7.	Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output, dan Komponen Kegiatan Balai Diklat LHK Makassar	23
Tabel 8.	Gambaran ringkas proses penurunan pohon kinerja dengan Logic Model	28
Tabel 9.	Target IKK Balai Diklat LHK Makassar Per Tahun	29
Tabel 10.	Target Komponen Kegiatan Balai Diklat LHK Makassar Per Tahun	29
Tabel 11.	Rencana Alokasi Pembiayaan Balai Diklat LHK Makassar Tahun 2020 – 2024	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

A. Tugas dan Fungsi

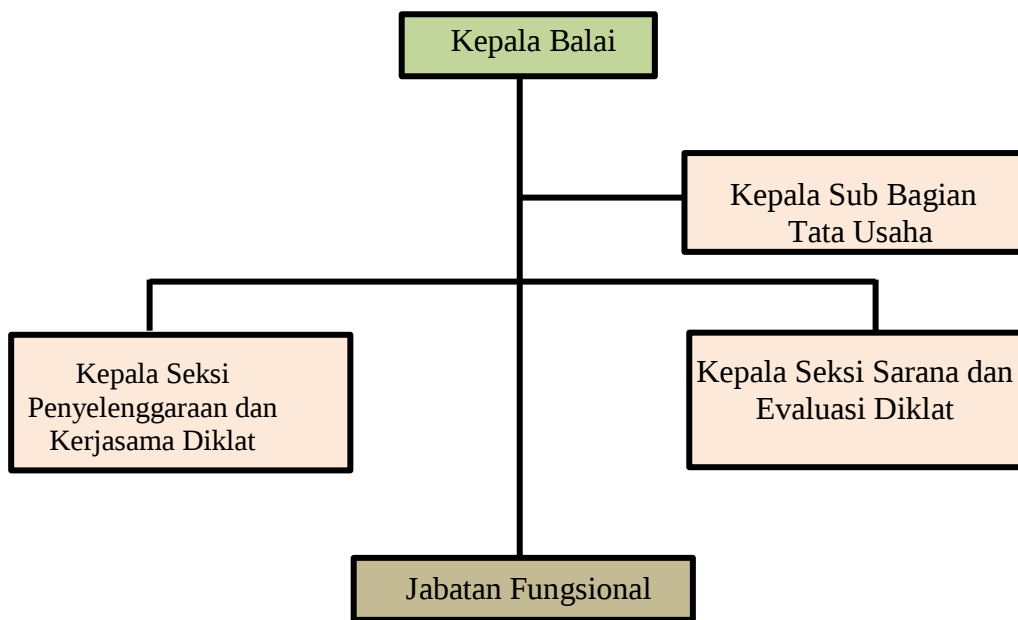
Balai Diklat LHK Makassar melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, Balai Diklat LHK mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas di atas, Balai Diklat LHK Makassar menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan;
2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
3. Pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan;
4. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
5. Pelaksanaan pengelolaan hutan pendidikan dan pelatihan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan pelatihan;
7. Pelaksanaan pelayanan data dan informasi pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Balai Diklat Kehutanan Makassar memiliki Susunan Organisasi yang terdiri atas:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Seksi Sarana Hutan Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Diklat LHK Makassar

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan administrasi barang milik negara dan rumah tangga. Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan identifikasi kebutuhan diklat (IKD), penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan. Seksi Sarana dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pengelolaan hutan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi pasca diklat (EPD) dan pelaporan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pelayanan data dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan.

B. Wilayah Layanan

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar memiliki 10 provinsi wilayah pelayanan yang tersebar di Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua. Wilayah pelayanan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar adalah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Sebagai konsekuensi perubahan nomenklatur organisasi dari penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, maka cakupan layanan Balai Diklat LHK Makassar tidak hanya UPT/dinas yang mengurus kehutanan di kabupaten/kota tetapi juga badan/dinas lingkungan hidup daerah yang ada di wilayah pelayanan.

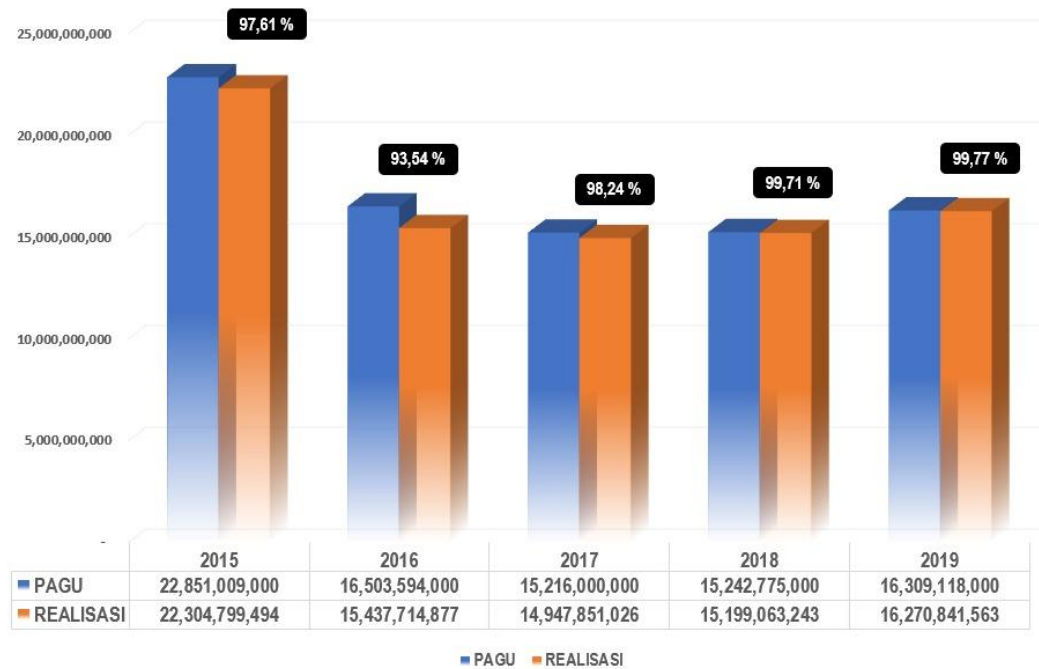
B. Capaian Renstra Balai Diklat LHK Makassar 2015 - 2019

Realisasi capaian kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Balai Diklat Kehutanan Makassar Tahun 2015-2019 menjadi salah satu acuan dalam penetapan target sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

1. Pelaksanaan anggaran

Anggaran satker Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar tahun 2015-2019 yang bersumber dari dana Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Anggaran tersebut secara umum diperuntukan bagi pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran, penyelenggaraan diklat, pemeliharaan sarana dan prasarana diklat, pengembangan kelembagaan dan pengadaan sarana prasarana diklat.

Sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Diklat LHK Makassar 2015 – 2019, total Pagu Anggaran senilai Rp. 86.122.496.000. Adapun realisasi pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana DIPA Balai Diklat LHK Makassar selama kurun waktu 2015 – 2019 senilai Rp. 84.160.270.203 atau sebesar 97,72 %.



Gambar 2. Grafik Pagu dan Realisasi Anggaran Balai Diklat LHK Makassar Tahun 2015 - 2019

2. Penyelenggaraan Diklat

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM LHK, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar menyelenggarakan diklat yang terdiri atas Diklat Aparatur, Diklat Non Aparatur, Pelatihan Masyarakat dan Diklat Kerjasama dengan Instansi/Lembaga yang lain baik dari dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun dari luar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana serta realisasi pelaksanaan diklat di Balai Diklat LHK Makassar 2015 – 2019 disajikan pada Tabel 1. Pelaksanaan pelatihan tahun 2015 - 2019 dengan lulusan sebanyak 5.434 orang peserta dari target renstra Tahun 2015 – 2019 sebanyak 4.866 orang peserta (111,67 %) berupa Diklat Aparatur dan Non Aparatur, Pelatihan Masyarakat dan Diklat Kerjasama yang terdiri atas Diklat Teknis, Diklat Administrasi, Diklat Fungsional, Diklat bagi Tenaga Bakti Rimawan, Diklat Tenaga Pendamping bagi KTH dan diklat bagi non aparatur dan masyarakat dengan perincian sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1. Rencana dan Realisasi Diklat Pada Balai Diklat LHK Makassar Tahun 2015 – 2019

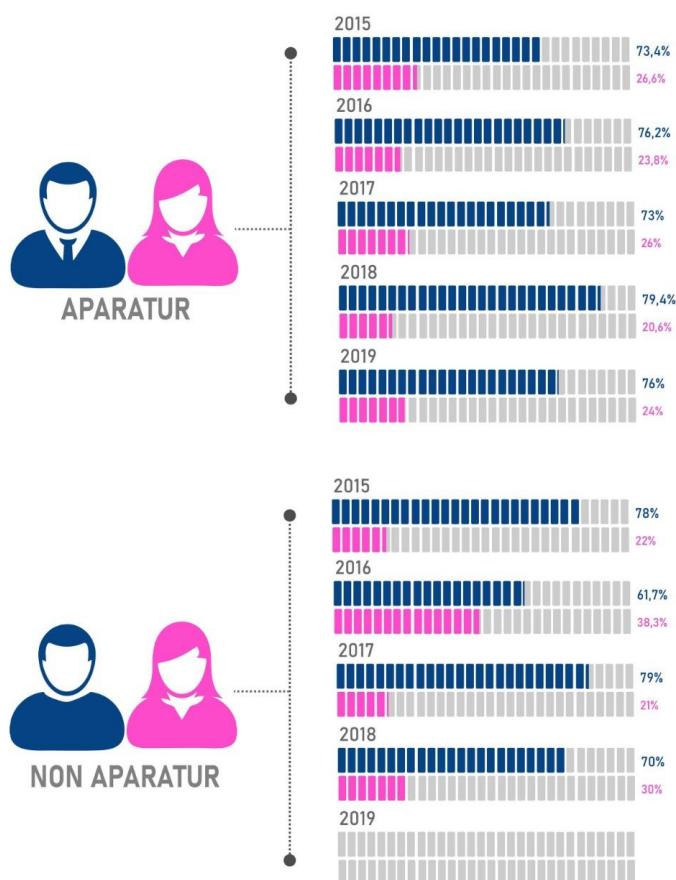
No. Jenis Diklat	Jumlah peserta per tahun (orang)									
	Rencana					Realisasi				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
A. Sumber Dana DIPA Balai Diklat LHK Makassar										
1. Diklat aparatur dan non aparatur	1.010	510	585	760	760	1.010	510	587	520	575
- Teknis	830	300	435	550	550	743	270	325	360	485
- Fungsional	90	30	-	60	60	90	30	90	-	30
- Administrasi	90	-	30	30	30	147	30	55	30	-
- Tenaga Bakti Rimbawan	-	120	60	60	60	-	120	62	70	-
- Tenaga Pendamping KTH	-	60	60	60	60	30	60	55	60	60
2. Pelatihan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	540	120
Jumlah A	1.010	510	585	760	760	1.010	510	587	1.060	695
B. Sumber Dana Diklat Kerjasama										
1. Diklat Teknis	170	441	210	210	210	-	52	-	887	1.066
Jumlah B	170	441	210	210	210	-	52	-	887	1.066
Jumlah A + B	1.180	951	795	970	970	1.010	562	587	1.947	1.761
Total Peserta	4.866					5.867				

Realisasi jumlah peserta melalui diklat kerjasama dalam dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (2018 – 2019) memberikan kontribusi besar dalam pencapaian realisasi jumlah peserta 120,57 % dari rencana 2015 – 2019.

Capaian kinerja Balai Diklat LHK Makassar Tahun 2015 – 2019 yang tinggi tersebut, tidak terlepas dari kerja bersama atau berkolaborasi. Balai Diklat LHK Makassar menyadari bahwa perkembangan dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kompleksitas, volatilitas, dan ambiguitas menuntut keahlian-keahlian baru agar kita bisa adaptif terhadap zaman yang berubah, antara lain kemampuan bekerja bersama (kolaborasi), kerja kreatif, dan kerja cepat. Mau tidak mau kemampuan kolaborasi harus makin diasah karena era ketidakpastian tidak bisa dihadapi sendirian. Selain kolaborasi, kreativitas

dan kepandaian memecahkan masalah kompleks juga penting untuk menghadapi era baru ini. Sedangkan volatilitas membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kecepatan dan kelincahan.

Peserta diklat tahun 2015 – 2019 secara umum terdiri dari peserta laki-laki dan perempuan tetapi ada beberapa diklat yang hanya diikuti oleh peserta laki-laki. Komposisi realisasi peserta diklat yang bersumber dari dana DIPA Balai Diklat LHK Makassar tahun 2015 – 2019 berdasarkan kelompok gender sebagaimana tertera pada diagram di bawah ini.



Gambar 3. Peserta Diklat Berdasarkan Kelompok Gender Balai Diklat LHK Makassar Tahun 2015 - 2019

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa sebagian besar peserta diklat pada tahun 2015 – 2019 masih lebih banyak peserta laki-laki dibanding peserta perempuan. Rata-rata persentase peserta diklat aparatur laki-laki berjumlah 75,6 % sedangkan peserta perempuan 24,4 %. Peserta diklat non aparatur juga umumnya didominasi oleh peserta laki-laki sebesar 72,18 % dan peserta perempuan 27,82 %.

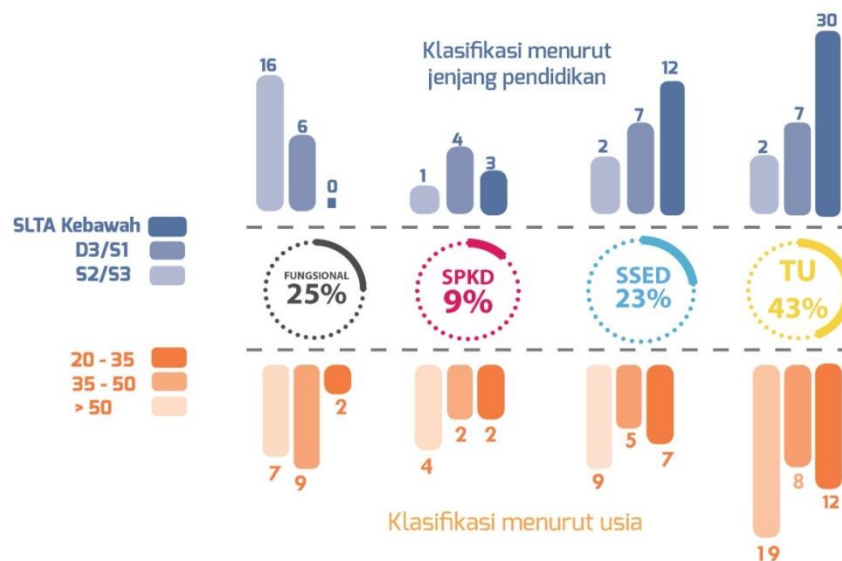
1.2. Potensi dan Permasalahan

A. Potensi

Salah satu faktor determinan yang mendukung keberhasilan pengembangan sumberdaya manusia melalui kegiatan diklat adalah potensi yang dimiliki oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar. Potensi tersebut antara lain : sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan modal dasar dalam pembangunan, khususnya dalam upaya pencapaian target kinerja penyelenggaraan tupoksi Balai Diklat LHK Makassar. Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar merupakan unit eselon III pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan UPT dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.



Gambar 4. Distribusi Pegawai Balai Diklat LHK Makassar Tahun 2019

Sampai dengan tahun 2019 jumlah pegawai di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar sebanyak 88 orang, yang terdiri atas 63 orang PNS dan 25 orang Non PNS (PPNPN).

Berdasarkan distribusi pegawai tersebut, Balai Diklat LHK Makassar peduli untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM yang dimilikinya. Selain itu juga mengembangkan sinergitas antar seksi dan sinergitas dengan stakeholders, antara lain dengan SMK Negeri Makassar, SMK Widya

Nusantara Maros, dan UPT KLHK maupun instansi lingkup pemerintah daerah di wilayah layanan.

b. Sarana dan Prasarana Diklat

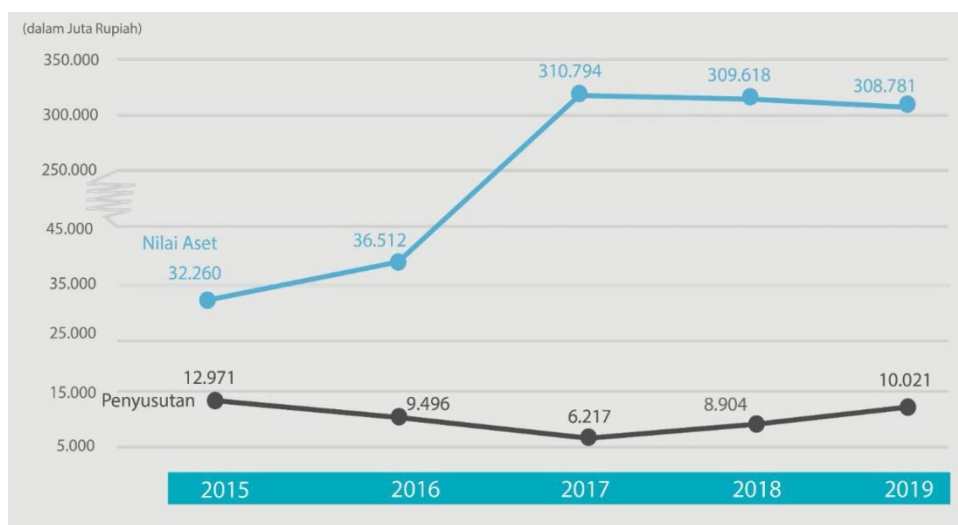
Balai Diklat LHK Makassar memiliki sarana prasarana kediklatan yang berada di 2 (dua) lokasi yaitu di Kampus Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar dan di Kampus Tabo-Tabo, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep. Sarana prasarana berupa fasilitas perkantoran dan fasilitas diklat berupa asrama, ruang kelas, perpustakaan, aula, ruang makan, serta sarana penunjang lainnya.



Gambar 5. Ilustrasi Kapasitas Asrama dan Mess Balai Diklat LHK Makassar Tahun 2019

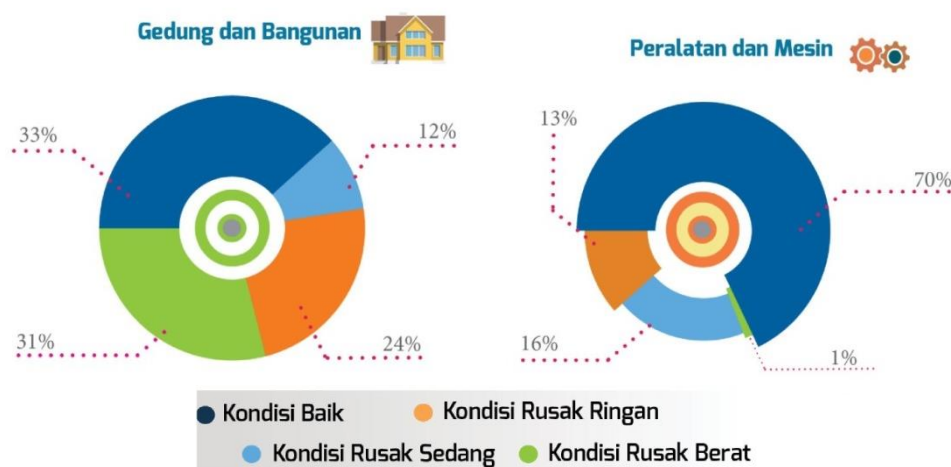
Sarana dan prasarana atau fasilitas diklat merupakan unsur yang penting dalam penilaian akreditasi lembaga diklat, unsur ini mempunyai bobot penilaian sebesar 25 persen sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan P2SDM Nomor 1 Tahun 2017.

Nilai aset Balai Diklat LHK Makassar pada periode yang berakhir 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp. 308.781.000.000,-. Nilai aset ini terdiri atas aset lancar sebesar Rp. 220.799.100,-; aset tetap (neto) sebesar Rp. 308.419.836.743,- dan aset lainnya (neto) sebesar Rp. 141.204.470,-.



Gambar 6. Grafik Nilai Aset dan Penyusutannya Tahun 2015 - 2019

Total aset Balai Diklat LHK Makassar sejak tahun 2017 mengalami penurunan dikarenakan laju akumulasi penyusutan yang lebih besar dibandingkan laju penambahan aset baru. Kondisi aset baik gedung dan bangunan maupun peralatan dan mesin juga sebagian dalam kondisi rusak. Kerusakan relatif besar terjadi pada aset gedung dan bangunan yaitu 67 persen rusak, dengan perincian 12 persen rusak berat, 24 persen rusak sedang, dan 31 persen rusak ringan. Sedangkan peralatan dan mesin dalam kondisi rusak sebanyak 30 persen, dengan perincian 16 persen rusak berat, 1 persen rusak sedang, dan 13 persen rusak ringan.



Gambar 7. Kondisi Aset Balai Diklat LHK Makassar Tahun 2019

Data-data tersebut di atas menunjukkan bahwa perlunya perhatian terhadap peningkatan kualitas sarana dan prasarana diklat, baik berupa pengadaan sarana dan prasarana atau peralatan baru maupun perlunya rehabilitasi gedung dan bangunan yang telah ada agar dapat berfungsi dengan baik.

Beberapa fasilitas sarana dan prasarana lainnya di kampus Sudiang Kota Makassar dan kampus Tabo-Tabo Kabupaten Pangkep disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Fasilitas/Sarana kediklatan Balai Diklat LHK Makassar di Kampus Sudiang, Makassar

NO.	JENIS	UNIT	KAPASITAS
1	Gedung Kantor	1	-
2	Ruang Kelas	6	170 orang
3	Ruang Sekretariat	2	10 orang
4	Perpustakaan	1	15 orang
5	Aula	1	250 orang
6	Asrama	3	105 orang
7	Ruang Makan	1	150 orang
8	Mesjid	1	100 orang
9	Mess	1	21 orang
10	Joglo	2	60 orang
11	Tower Air	3	24 M3
12	Pos Jaga	1	-
13	Garasi	2	-

Tabel 3. Fasilitas/Sarana Kediklatan Balai Diklat LHK Makassar di Kampus Hutan Diklat Tabo-Tabo, Kab. Pangkep

NO.	JENIS	UNIT	KAPASITAS
1	Ruang Kelas	3	90 orang
2	Aula	1	200 orang
3	Asrama	2	84 orang
4	Mess	1	7 orang
5	Ruang Makan dan dapur	1	150 orang
6	Guest House	4	16 orang
7	Mesjid	1	100 orang
8	Pos Jaga	1	-
9	Bak Penampungan Air	1	18 M3
10	Menara Pengawas Kebakaran	1	-
11	Kandang Rusa	1	12 ekor
12	Kandang Sapi	1	3 ekor
13	Dome Kupu-kupu	1	24 m ²
14	Gazebo	4	40 orang

Kawasan Hutan Diklat Tabo-Tabo merupakan bagian dari kawasan hutan Pegunungan Bulusaraung di Kabupaten Pangkep. Kawasan Hutan Diklat Tabo-Tabo terletak pada 118° 49' 42" BT - 118° 49' 45" BT dan 04° 40' 45" LS - 04° 40' 47" LU. Kawasan ini berada dalam wilayah administrative pemerintahan Desa Tabo-Tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan Hutan Diklat Tabo-Tabo berada pada ketinggian 50-500 m di atas permukaan laut (dpl) dengan keadaan topografi datar bergelombang, berbukit sampai bergunung. Pada kawasan ini hanya sedikit sekali atau kurang dari 5 % areal datar.

[illegible]

Gambar 8. Peta Kawasan Hutan Diklat Tabo-Tabo, Kab. Pangkep

Di kawasan Hutan diklat Tabo-Tabo telah dibangun beberapa unit demplot untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan LHK. Beberapa demplot yang terdapat di hutan diklat Tabo-Tabo adalah :

1. Demplot Mahoni
2. Demplot Reboisasi Mahoni
3. Demplot Eboni lokal
4. Demplot jati propenan
5. Demplot uji coba jati
6. Demplot Shorea sp (Meranti)
7. Demplot kebakaran hutan
8. Demplot Agroforestry
9. Demplot jenis tanaman obat

B. Permasalahan

Disamping beberapa potensi yang dapat dijadikan modal dalam meningkatkan kulaitas penyelenggaraan diklat lingkungan hidup dan kehutanaan lima tahun ke depan, masih ditemui beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut harus bisa diatasi dalam kurun waktu 2020 - 2024. Beberapa permasalahan yang dihadapi Balai Diklat LHK Makassar antara lain:

- Belum banyak tersedia kurikulum pelatihan yang adaptif terhadap perkembangan era industri 4.0 berupa kurikulum pelatihan dengan metode *elearning* dan *blended learning*
- Belum tersedianya modul-modul diklat yang berbasis kompetensi
- Kegiatan IKD dan EPD terkendala oleh luasnya wilayah pelayanan dan keterbatasan dana sehingga diperlukan penyempurnaan metode IKD dan EPD yang efektif.
- Keberadaan KHDTK Tabo-Tabo belum sepenuhnya berperan secara optimal memenuhi kebutuhan pelatihan, belum memberikan pengaruh signifikan terhadap sumber penghidupan yang layak bagi masyarakat sekitar, serta belum sepenuhnya mampu kontribusi nyata sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi berupa model pengelolaan hutan lestari.
- Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana diklat antara lain kurangnya fasilitas teknologi informasi yang memadai.
- Belum terbangunnya budaya kerja organisasi yang berorientasi pada pelayanan.

C. Analisis SWOT

Sasaran kegiatan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar didasarkan pada rujukan kondisi lingkungan strategis yang meliputi faktor internal maupun eksternal organisasi yang dianalisis melalui pendekatan SWOT. Analisis internal meliputi penilaian pada faktor kekuatan dan kelemahan, sementara analisis eksternal mencakup faktor peluang dan tantangan.

1. Lingkungan Strategis Internal

a. Kekuatan

Kekuatan merupakan kelebihan yang dimiliki Balai Diklat LHK Makassar. Kekuatan tersebut apabila dimanfaatkan akan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan. Kekuatan yang dimiliki Balai Diklat LHK Makassar adalah :

- 1) Tersedianya tenaga kediklatan yang terdiri atas tenaga pengelola (pejabat struktural dan non struktural) sebanyak 53 orang, tenaga widyaiswara sebanyak 18, fungsional penyuluh kehutanan 1 orang, fungsional pengada barang dan jasa 1 orang, dan PPNPN 23 orang.
- 2) Tersedianya fasilitas diklat berupa gedung perkantoran, gedung pendidikan (kelas, aula, perpustakaan, dll), asrama, dapur, ruang makan beserta kelengkapannya, hutan diklat, dan peralatan praktek.
- 3) Tersedianya hutan diklat sebagai sarana praktek, demplot, sarana ekowisata, pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dan kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan.
- 4) Tersedianya dana tetap penyelenggaraan diklat lingkungan hidup dan kehutanan yang bersumber dari anggaran negara dan dana tidak tetap dari pihak lain dalam bentuk kerjasama kediklatan.
- 5) Terjalinnya koordinasi penyelenggaraan diklat dengan unit-unit kerja lingkup Kementerian LHK, pemerintah daerah dan instansi/lembaga lain yang terkait.

b. Kelemahan

- 1) Belum semua kurikulum berdasarkan diklat berbasis kompetensi.

- 2) Belum tersedia modul untuk diklat – diklat teknis berbasis kompetensi.
- 3) Belum semua jenis diklat berorientasi pada peningkatan keterampilan teknis dan administrasi, atau belum sepenuhnya mengarah pada peningkatan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) sulit dilaksanakan sesuai pedoman karena keterbatasan dana dan luasnya wilayah pelayanan.
- 5) Hasil Evaluasi Pasca Diklat (EPD) belum secara fungsional dijadikan acuan penyempurnaan penyelenggaraan diklat.
- 6) Kurangnya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana diklat.
- 7) Lemahnya kompetensi pengelola sarana dan prasarana diklat.
- 8) Kurangnya pengalaman lapangan widyaiswara yang menunjang peningkatan kompetensi dan kapabilitas sesuai bidang masing-masing.
- 9) Belum terbangunnya budaya kerja organisasi yang berorientasi pada peningkatan mutu layanan.
- 10) Fasilitas teknologi informasi untuk pembelajaran jarak jauh (*elearning*) belum memadai.

2. Lingkungan Strategis Eksternal

a. Peluang

- 1) Terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berimplikasi terhadap bertambahnya kebutuhan SDM kehutanan pada semua tingkatan.
- 2) Perubahan nomenklatur kementerian, berimplikasi pada semakin luasnya tugas pembinaan SDM aparatur.
- 3) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat dan pesat mempengaruhi wawasan, cara berpikir dan tata nilai yang memerlukan peningkatan daya saing SDM.
- 4) Penerapan otonomi daerah yang berimplikasi terhadap perubahan tata administrasi publik memerlukan dukungan diklat guna meningkatkan kualitas SDM LHK pada dinas/instansi pemerintah daerah.

- 5) Meningkatnya usaha bidang kehutanan memerlukan pengetahuan, keterampilan teknis dan manajemen, baik di sektor industri kehutanan hulu maupun hilir.
- 6) Meningkatnya perhatian masyarakat pada bidang konservasi dan lingkungan sehingga memerlukan pengetahuan dan keterampilan praktis mengenai konservasi sumberdaya alam.
- 7) Implementasi konvensi-konvensi internasional di bidang kehutanan dan lingkungan global memerlukan dukungan SDM yang profesional.

b. Ancaman/Tantangan

- 1) Belum jelasnya pembagian yurisdiksi diklat antara Pusdiklat SDM LHK dengan Balai Diklat LHK.
- 2) Diklat belum menjadi bagian dari sistem karir SDM aparatur LHK.
- 3) Tumbuh dan berkembangnya berbagai lembaga kediklatan serta tenaga kediklatan berimplikasi munculnya tingkat persaingan yang sangat kompetitif.
- 4) Masih adanya adanya kebijakan penyelenggaraan pelatihan oleh lembaga non diklat lingkup kementerian.
- 5) Penyelenggaraan diklat masih dipandang sebagai kegiatan *cost center*, belum dipandang sebagai *human capital* yang memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi organisasi.
- 6) Heterogenitas budaya, adat istiadat, keadaan wilayah serta akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan menuntut adanya sistem, pola, prosedur, metoda, teknik dan pendekatan serta cara yang berbeda-beda pula.

Analisis Lingkungan Strategis

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
1. Tersedianya tenaga kediklatan yang terdiri atas tenaga pengelola (pejabat struktural dan non struktural) 53 orang, widyaiswara 18 orang, fungsional penyuluh kehutanan 1 orang, fungsional pengada barang dan jasa 1 orang serta tenaga kontrak 23 orang. 2. tersedianya fasilitas diklat berupa gedung perkantoran, gedung pendidikan (kelas, aula, perpustakaan,dll.), asrama, dapur, ruang makan beserta kelengkapannya, hutan diklat, peralatan praktek diklat, sarana transportasi dan komunikasi yang relatif memadai. 3. Tersedianya dana tetap penyelenggaraan diklat lingkungan hidup dan kehutanan yang bersumber dari anggaran negara dan dana tidak tetap dari pihak lain dalam format kerjasama kediklatan. 4. Terjalannya koordinasi penyelenggaraan diklat dengan unit-unit kerja lingkup Kementerian LHK, pemerintah daerah dan instansi/lembaga lain yang terkait. 5. Tersedianya hutan diklat sebagai sarana praktek, demplot, ekowisata, pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dan kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan.	1. Belum semua kurikulum berdasarkan diklat berbasis kompetensi. 2. Belum tersedia modul untuk diklat – diklat teknis. 3. Belum semua jenis diklat berorientasi pada peningkatan keterampilan teknis dan administrasi, atau belum mengarah pada peningkatan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. 4. Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) belum dilaksanakan sesuai pedoman karena keterbatasan dana. 5. Hasil Evaluasi Pasca Diklat (EPD) belum sepenuhnya dijadikan acuan penyempurnaan penyelenggaraan diklat. 6. Kurangnya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana diklat. 7. Lemahnya kemampuan mengelola sarana dan prasarana diklat. 8. Kurangnya pengalaman lapangan widyaiswara yang menunjang peningkatan kompetensi dan kapabilitas sesuai bidang masing – masing. 9. Belum terbangunnya budaya kerja organisasi yang berorientasi pada peningkatan mutu layanan. 10. Fasilitas teknologi informasi yang belum memadai.
Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threat)
1. Terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berimplikasi terhadap bertambahnya kebutuhan SDM kehutanan pada semua tingkatan. 2. berubahnya nomenklatur kementerian, berimplikasi semakin luasnya tugas pembinaan SDM aparatur. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi wawasan, cara berpikir dan tata nilai yang memerlukan peningkatan daya saing SDM. 4. Penerapan otonomi daerah yang berimplikasi pada perubahan tata administrasi publik memerlukan dukungan diklat guna meningkatkan kualitas SDM LHK pada dinas/instansi pemerintah daerah. 5. Meningkatnya usaha bidang kehutanan memerlukan pengetahuan, keterampilan teknis dan manajemen, baik di sektor industri kehutanan hulu maupun hilir. 6. Meningkatnya perhatian masyarakat pada bidang konservasi dan lingkungan sehingga memerlukan pengetahuan dan keterampilan praktis mengenai konservasi sumberdaya alam. 7. Implementasi konvensi-konvensi internasional di bidang kehutanan dan lingkungan global memerlukan dukungan SDM yang profesional.	1. Belum jelasnya pembagian yurisdiksi diklat antara Pusdiklat SDM LHK dengan Balai Diklat LHK 2. Diklat belum menjadi bagian dari sistem karir SDM aparatur LHK. 3. Tumbuh dan berkembangnya berbagai lembaga kediklatan serta tenaga kediklatan berimplikasi munculnya tingkat persaingan yang sangat kompetitif. 4. Adanya kebijakan pelaksanaan diklat oleh lembaga non diklat lingkup kementerian. 5. Penyelenggaraan diklat masih dipandang sebagai kegiatan cost center, belum dipandang sebagai human capital yang memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi organisasi. 6. Heterogenitas budaya, adat istiadat, keadaan wilayah serta akses terhadap sumberdaya hutan menuntut adanya sistem, pola, prosedur, metoda, teknik dan pendekatan serta cara yang berbeda-beda dalam proses pembelajaran.

Tabel 4. Strategi Pencapaian Sasaran Kegiatan

Strategi memanfaatkan peluang dengan kekuatan yang ada:	Strategi memanfaatkan peluang dengan menanggulangi kelemahan :
1. Menyelenggarakan diklat untuk memenuhi peningkatan kompetensi SDM di KPH 2. Mengidentifikasi kebutuhan diklat bidang lingkungan hidup 3. Meningkatkan promosi diklat pada stakeholder 4. Mengembangkan jenis-jenis diklat yang dapat memenuhi tuntutan/kebutuhan pengguna diklat. 5. Mengoptimalkan potensi hutan diklat sebagai sarana pembelajaran 6. Mengembangkan program – program diklat bidang LH 7. Mengembangkan program diklat bidang wirausaha kehutanan 8. Membangun kemitraan dengan masyarakat sekitar kawasan	1. Menyusun kurikulum diklat sesuai perkembangan teknologi 2. Menyusun modul – modul diklat yang sesuai dengan kurikulum 3. Meningkatkan pengalaman lapangan widyaiswara 4. Meningkatkan kualitas fasilitas teknologi informasi 5. Menyempurnakan perangkat kediklatan sesuai hasil Evaluasi Pascadiklat (EPD). 6. Mengembangkan kerjasama diklat dengan dinas yang menangani LHK 7. Meningkatkan kompetensi tenaga kediklatan melalui magang 8. Melengkapi fasilitas praktek diklat teknis di hutan diklat
Strategi mengatasi ancaman dengan kekuatan yang ada:	Strategi mengurangi kelemahan dan mengatasi ancaman :
1. Mengoptimalkan pemanfaatan tenaga kediklatan, sarana prasarana dan teknologi kediklatan serta hutan diklat untuk mendukung terlaksananya diklat yang berkualitas. 2. Mendesain metode pembelajaran sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta 3. Meningkatkan sinkroniasi dan kolaborasi para pihak dalam menyelenggarakan diklat kehutanan.	1. Membangun komunikasi dengan lembaga non diklat di wilayah layanan 2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan diklat melalui pendayagunaan tenaga kediklatan. 3. Meningkatkan keterampilan user dalam melakukan IKD 4. Mengoptimalkan hasil EPD untuk perbaikan penyelenggaraan diklat.

Berdasarkan analisis SWOT di atas, dilakukan uji keterkaitannya dengan sasaran program, sasaran kegiatan, dan tata nilai. Tata nilai yang digunakan meliputi: 1) integritas, 2) etos kerja, dan 3) gotong royong.

Tabel 5. Identifikasi Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)

No.	Identifikasi penilaian	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan		NILAI			FKK
		1	2	2	6	1	2	3	
1	Strategi memanfaatkan peluang dengan kekuatan yang ada (S-O)								
1.1	Menyelenggarakan diklat untuk memenuhi peningkatan kompetensi SDM di KPH	4	4	4	2	3	3	3	23
1.2	Mengidentifikasi kebutuhan diklat bidang lingkungan hidup	3	4	4	3	3	2	3	22
1.3	Meningkatkan promosi diklat pada stakeholder	4	3	2	2	2	4	3	20
1.4	Mengembangkan jenis-jenis diklat yang dapat memenuhi tuntutan/kebutuhan pengguna diklat.	3	3	4	3	4	4	3	24
1.5	Mengoptimalkan potensi hutan diklat sebagai sarana pembelajaran	4	4	3	4	3	4	3	25
1.6	Mengembangkan program – program diklat bidang LH	3	4	4	2	4	3	4	24
1.7	Mengembangkan program diklat bidang wirausaha kehutanan	4	3	4	3	4	4	4	26
1.8	Membangun kemitraan dengan masyarakat sekitar kawasan	3	4	3	4	3	3	4	24
2	Strategi mengatasi ancaman dengan kekuatan yang ada (S-T)								
2.1	Mengoptimalkan pemanfaatan tenaga kediklatan, sarana prasarana dan teknologi kediklatan serta hutan diklat untuk mendukung terlaksananya diklat yang berkualitas.	2	3	4	3	4	4	4	24
2.2	Mendesain metode pembelajaran sesuai kebutuhan dan karekteristik peserta	2	3	4	3	3	4	3	22
2.3	Meningkatkan sinkroniasi dan kolaborasi para pihak dalam menyelenggarakan diklat kehutanan.	4	3	3	4	4	4	4	26
3	Strategi memanfaatkan peluang dengan menanggulangi kelemahan (W-O)								
3.1	Menyusun kurikulum diklat sesuai perkembangan teknologi	2	3	4	3	3	4	3	22
3.2	Menyusun modul – modul diklat yang sesuai dengan kurikulum	2	3	4	3	3	3	3	21
3.3	Meningkatkan pengalaman lapangan widyaiswara	2	3	4	3	4	4	4	24
3.4	Meningkatkan kualitas fasilitas teknologi informasi	2	3	4	3	3	4	3	23

3.5	Menyempurnakan perangkat kediklatan sesuai hasil Evaluasi Pascadiklat (EPD)	2	3	4	3	4	4	3	24
3.6	Mengembangkan kerjasama diklat dengan SKPD yang menangani LHK	4	3	4	4	4	4	4	27
3.7	Meningkatkan kompetensi tenaga kediklatan melalui magang	2	3	4	3	4	4	4	24
3.8	Melengkapi fasilitas praktek diklat teknis di hutan diklat	4	4	4	3	3	3	3	24
4	Strategi mengurangi kelemahan dan menanggulangi ancaman (W-T)								
4.1	Membangun komunikasi dengan lembaga non diklat di wilayah layanan	4	3	4	3	3	3	4	24
4.2	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan diklat melalui pendayagunaan tenaga kediklatan.	3	3	3	4	4	4	3	24
4.3	Meningkatkan keterampilan user dalam melakukan IKD	2	2	4	3	4	3	4	22
4.4	Mengoptimalkan hasil EPD untuk perbaikan penyelenggaraan diklat.	2	3	4	3	3	4	3	22

Penilaian keterkaitan dibuat pada skala 1 – 4, dengan klasifikasi 1 : tidak terkait, 2 : kurang terkait, 3 : terkait, dan 4 : sangat terkait.

Berdasarkan hasil identifikasi Faktor Kunci Keberhasilan disusunlah langkah operasional untuk melaksanakan kegiatan kediklatan, yaitu :

1. Mengembangkan kerjasama diklat dengan SKPD yang menangani LHK (3.6).
2. Meningkatkan sinkroniasi dan kolaborasi para pihak dalam menyelenggarakan diklat kehutanan (2.3).
3. Mengembangkan program diklat bidang wirausaha kehutanan (1.7).
4. Mengoptimalkan potensi hutan diklat sebagai sarana pembelajaran (1.5).
5. Mengembangkan jenis-jenis diklat yang dapat memenuhi tuntutan/kebutuhan pengguna diklat (1.4).
6. Mengembangkan program – program diklat bidang LH (1.6).
7. Membangun kemitraan dengan masyarakat sekitar kawasan (1.8).
8. Mengoptimalkan pemanfaatan tenaga kediklatan, sarana prasarana dan teknologi kediklatan serta hutan diklat untuk mendukung terlaksananya diklat yang berkualitas. (2.1).
9. Meningkatkan pengalaman lapangan widyaiswara (3.3).

10. Menyempurnakan perangkat kediklatan sesuai hasil Evaluasi Pasca Diklat (EPD) (3.5).
11. Meningkatkan kompetensi tenaga kediklatan melalui magang (3.7).
12. Melengkapi fasilitas praktek diklat teknis di hutan diklat (3.8).
13. Membangun komunikasi dengan lembaga non diklat di wilayah layanan (4.1)
14. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan diklat melalui pendayagunaan tenaga kediklatan (4.2).
15. Menyelenggarakan diklat untuk memenuhi peningkatan kompetensi SDM di KPH (1.1).
16. Meningkatkan kualitas fasilitas teknologi informasi (3.4).
17. Mengidentifikasi kebutuhan diklat bidang lingkungan hidup (1.2).
18. Mendesain metode pembelajaran sesuai kebutuhan dan karekteristik peserta (2.2).
19. Menyusun kurikulum diklat sesuai perkembangan teknologi (3.1).
20. Meningkatkan keterampilan user dalam melakukan IKD (4.3).
21. Mengoptimalkan hasil EPD untuk perbaikan penyelenggaraan diklat (4.4).
22. Menyusun modul – modul diklat yang sesuai dengan kurikulum (3.2).
23. Meningkatkan promosi diklat pada stakeholder (1.3).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Adapun rumusan Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah: "TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG". Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang selaras dengan rumusan di atas, yaitu : "KLHK yang Inovatif dan Berdaya Saing dengan Berbasis Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan", dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yakni : "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan GotongRoyong".

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait langsung dengan misi Presiden ke-4 yaitu "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan". Pernyataan pada misi tersebut menjadi acuan dalam merumuskan lebih lanjut misi KLHK. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi KLHK, misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mewujudkan manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia KLHK yang inovatif dan berdaya saing;
4. Mewujudkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Sebagai penjabarannya, terdapat 4 (empat) pilar pembangunan dari KLHK untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden tersebut, yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Kementerian LHK juga memiliki 6 (enam) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis untuk mempercepat dalam mencapai target-target pembangunan nasional, yaitu:

1. Kesenjangan gender
2. Tata kelola pemerintahan yang baik
3. Pembangunan berkelanjutan
4. Kerentanan bencana dan perubahan iklim
5. Modal sosial dan budaya
6. Transformasi digital

Rumusan tujuan KLHK disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Presiden tahun 2020-2024, rumusan visi dan misi KLHK, serta penyelarasan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDG's). Tujuan KLHK adalah:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim;
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk perekonomian nasional;
3. Mengoptimalkan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM KLHK;

5. Meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Sasaran strategis KLHK disusun dengan menjabarkan tujuan KLHK, juga memperhatikan keterkaitan dengan pernyataan Visi dan Misi KLHK, rumusan sasaran strategis KLHK adalah:

1. Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim (SS-1)

Indikator pada SS-1 adalah:

- 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- 2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi dari 5 Sektor Pembangunan;
- 3) Penurunan Laju Deforestasi;
- 4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah;
- 5) Luas Pemulihan Kondisi Lahan dalam DAS;
- 6) Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - *High Conservation Values*)

2. Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai Dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (SS-2)

Indikator pada SS-2 adalah:

- 1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional;
- 2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting;
- 3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3. Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan (SS-3)

Indikator pada SS-3 adalah:

- 1) Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan;
- 2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
- 3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat

4. Tercapainya Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK serta Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Baik (SS-4)

Indikator pada SS-4 adalah:

- 1) Kategori Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan;
- 2) Penyelesaian Kasus bidang LHK;
- 3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE);
- 4) Hasil Litbang yang Inovatif dan Implementatif;
- 5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KLHK;
- 6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK;
- 7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK;
- 8) Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) KLHK.

2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program BP2SDM

Visi misi Badan P2SDM juga mengacu pada Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden RI yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Selain itu Visi BP2SDM juga mengacu pada rumusan Visi KLHK yaitu "KLHK yang Inovatif dan Berdaya Saing dengan Berbasis Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan".

Dengan mengacu pada misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terkait langsung dengan misi Presiden ke-4 yaitu "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan". Badan P2SDM memiliki program dan kegiatan yang berfokus untuk mendukung terlaksananya semua misi KLHK yang sudah dirumuskan yaitu: (1) Mewujudkan sumber daya hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas; (2) Mewujudkan manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia KLHK yang inovatif dan berdaya saing; serta (4) Mewujudkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik. Berdasarkan tugas dan fungsi BP2SDM, misi KLHK yang sangat terkait langsung dengan BP2SDM adalah misi ketiga.

Berdasarkan visi, misi KLHK yang telah dijelaskan di atas, rumusan tujuan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah "Meningkatkan Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan". Melalui tujuan ini diharapkan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dapat semakin meningkat dan memiliki daya saing tinggi dan mampu adaptif dengan perkembangan zaman saat ini.

Badan P2SDM mendukung sasaran strategis 4 KLHK yaitu "Tercapainya Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK serta Efektivitas Tata Kelola Pembangunan

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Baik (SS-4)". Indikator utama yang didukung oleh Badan P2SDM yaitu (1) Kategori Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan; (2) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK; (3) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK; dan (4) Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) KLHK. Untuk mendukung indikator utama tersebut, Badan P2SDM memiliki 5 (lima) indikator kinerja program dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja kegiatan.

BAB III

KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan *Output* Kegiatan Balai Diklat LHK Makassar

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar selaku UPT dari Kementerian LHK melaksanakan penjabaran sasaran program dan sasaran kegiatan Badan P2SDM. Untuk mencapai target sasaran program dan sasaran kegiatan tersebut terdapat 3 (tiga) kegiatan yang terkait dengan Balai Diklat LHK Makassar sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan P2SDM sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK (5441)
2. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan (5443)
3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM (5439)

Dari kegiatan tersebut, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar menjabarkan dalam sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan klasifikasi rincian output (KRO) sebagai berikut:

Tabel 6. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Klasifikasi Rincian Output (KRO) Balai Diklat LHK Makassar

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK (5441)		
01 Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK)/Hutan Diklat	01 Nilai KHDTK yang dikelola	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (CAG)
03 Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	05 Jumlah SDM LHK di tingkat tapak yang kompeten	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup (SCE)
	06 Lulusan diklat aparatur dan non aparatur LHK	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DCE)

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)
	08 Jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup (SCE)
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan (5443)		
06 Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dan Generasi Lingkungan Hidup	15 Jumlah SDM masyarakat yang terlatih, peduli dan berbudaya lingkungan	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DCE)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM (5439)		
07 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada BP2SDM	16 Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	a. Layanan Umum (EAC) b. Layanan Perkantoran (EAA)

3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing *Output* Kegiatan Balai Diklat LHK Makassar

Berdasarkan kegiatan dan sasaran kegiatan Badan P2SDM, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar menjabarkan komponen kegiatan dari masing-masing output kegiatan atau klasifikasi rincian output (KRO) sebagai berikut:

Tabel 7. Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output, dan Komponen Kegiatan Balai Diklat LHK Makassar

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Komponen
(CAG) Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001 Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	051 Pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan
(DCE) Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001 Pelatihan Aparatur SDM LHK yang ditingkatkan	051 Pelatihan Teknis dan Fungsional 052 Pelatihan Administrasi
(SCE) Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001 Pelatihan SDM Non Aparatur yang ditingkatkan	051 SDM LHK Non Aparatur yang Ditingkatkan

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Komponen
	002 Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	051 Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK
(DCE) Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001 Pelatihan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	051 Pelatihan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(EAC) Layanan Umum	002 Layanan Dukungan Manajemen Satker	051 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran 052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 053 Pengelolaan Kepegawaian 054 Pelayanan Umum dan Perlengkapan
(EAA) Layanan Perkantoran	01 Layanan Perkantoran	001 Gaji dan Tunjangan 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Komponen kegiatan sebagaimana Tabel 7 di atas, disusun untuk menjelaskan tahapan atau bagian yang dilakukan untuk menunjang pencapaian keluaran (*output*) kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan P2SDM.

3.3. Pengarusutamaan

Salah satu dasar kebijakan untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan adalah pengarusutamaan. Kementerian LHK memiliki 6 (enam) kebijakan pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif untuk mencapai target-target pembangunan nasional, yaitu:

1. Kesenjangan gender

Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan Kementerian LHK bagi setiap

masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Kebijakan percepatan pengarusutamaan gender di lingkup Kementerian LHK antara lain melalui: (a) Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan; (b) Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG; (c) Penguatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG); (d) Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (e) Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah; (f) Penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender; (g) pengembangan inovasi pelaksanaan PUG.

Balai Diklat LHK Makassar sebagai UPT Badan P2SDM sejak tahun 2015 telah aktif dalam pelaksanaan percepatan pengarusutamaan kesetaraan gender. Sebagai lembaga diklat, saat ini Balai Diklat LHK Makassar sudah mulai menyediakan sarana prasarana yang mempertimbangkan kesetaraan gender. Saat ini Badan P2SDM juga mulai mengembangkan kriteria lembaga diklat yang responsif gender, termasuk di dalamnya metode dan kurikulum yang diperlukan dalam pelaksanaan diklat.

2. Tata kelola pemerintahan yang baik

Kebijakan Kementerian LHK dalam pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan meningkatkan kualitas manajemen ASN instansi pemerintah, meningkatkan efektivitas tata kelola instansi pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Pembangunan berkelanjutan

Kebijakan Kementerian LHK dalam pembangunan berkelanjutan adalah menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pengurangan limbah, menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam, meningkatkan kapasitas, kemampuan teknologi, pendanaan, dan pemantauan dalam pelaksanaannya, dan mengejawantahkan kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam arah pembangunan di setiap sektor/bidang dan wilayah/daerah.

4. Kerentanan bencana dan perubahan iklim

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan Kementerian LHK dalam mengurangi kerentanan bencana, yaitu melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang disertai dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap

kebencanaan, mengembangkan dan menguatkan sistem peringatan dini bencana sampai tingkat masyarakat, mengembangkan sistem logistik kebencanaan nasional dilengkapi sistem tata kelola dan distribusi yang dapat menjangkau wilayah terluar dan terpencil, sebagai upaya penanganan bencana. Peningkatan ketahanan iklim dilaksanakan melalui implementasi Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) pada sektor-sektor prioritas yaitu (1) ketahanan iklim sektor kelautan dan pesisir; (2) ketahanan iklim sektor air; (3) ketahanan iklim sektor pertanian; serta (4) ketahanan iklim sektor kesehatan.

5. Modal sosial dan budaya

Kebijakan Kementerian LHK dalam pengarusutamaan Modal Sosial Budaya diarahkan pada 4 (empat) program prioritas, yaitu: (1) Meningkatkan pembangunan inklusif berwawasan budaya, (2) Meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, (3) Mengembangkan produk dan jasa berbasis seni, budaya dan inovasi, (4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik.

6. Transformasi digital

Kebijakan Kementerian LHK dalam pengarusutamaan Transformasi Digital akan dicapai melalui kebijakan membangun kondisi yang mendorong pengembangan pelayanan digital, Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat, mengoptimalkan pengelolaan *Big Data*.

Balai Diklat LHK Makassar sebagai UPT Badan P2SDM akan sepenuhnya berkomitmen untuk dapat mewujudkan keenam kebijakan pada setiap pengarusutamaan yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK.

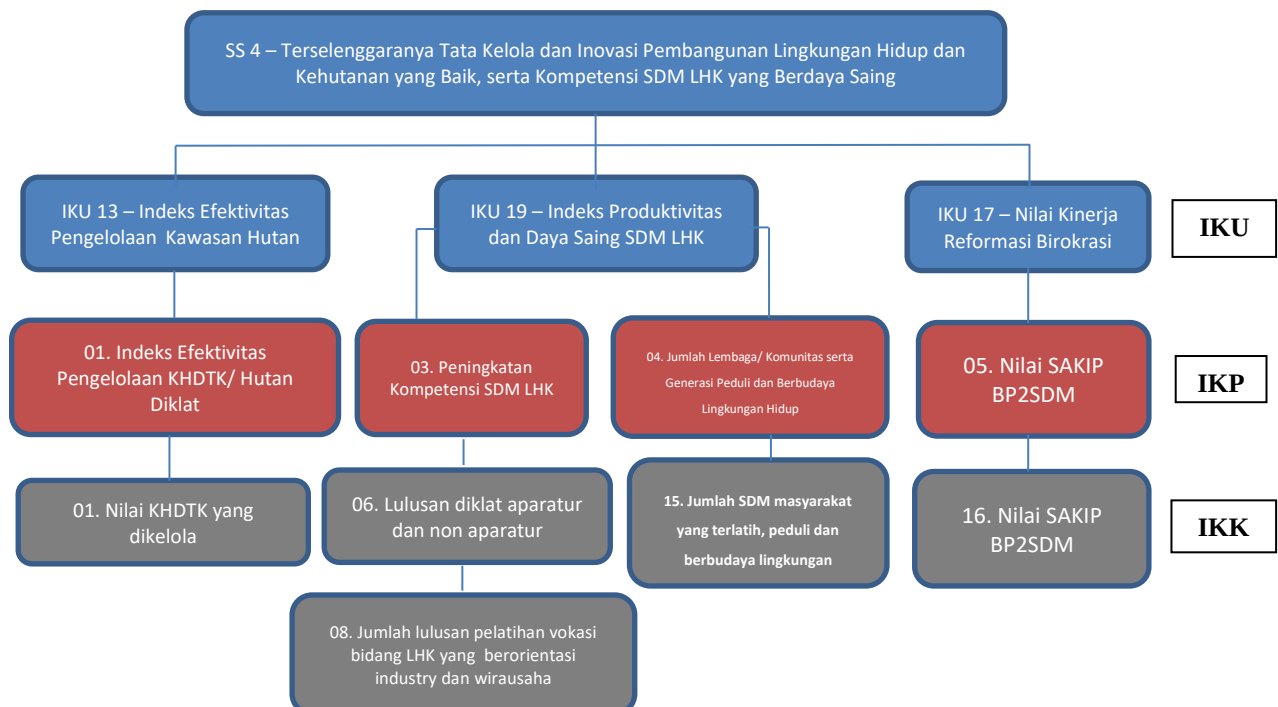
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan

Perumusan sasaran program, sasaran kegiatan dan komponen kegiatan pada Balai Diklat LHK Makassar disusun dengan mengacu pada sasaran program dan sasaran kegiatan yang telah disusun Badan P2SDM. Sasaran Strategis 4 "Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing.

Setelah redesain sistem perencanaan dan penganggaran, telah dilakukan restrukturisasi program pada Kementerian LHK. Restrukturisasi program pada Badan P2SDM terdapat 3 (tiga) program, yaitu Program Dukungan Manajemen, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Peta sasaran program, sasaran kegiatan dan komponen kegiatan (*cascading*), secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran dokumen Renstra Balai Diklat LHK Makassar. *Cascading* tersebut disusun untuk dapat mengetahui konsistensi antara rumusan sasaran program dan sasaran kegiatan Badan P2SDM dengan sasaran kegiatan dan komponen kegiatan yang disusun Balai Diklat LHK Makassar.



Gambar 9. Peta *Cascading* Terkait Balai Diklat LHK Makassar 2020 - 2024

Tabel 8. Gambaran ringkas proses penurunan pohon kinerja dengan *Logic Model*

Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Komponen	Satuan Target
IKP 1 Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK/ Hutan Diklat	Poin	01 Nilai KHDTK yang kelola	Poin	051 Pengembangan KHDTK Sebagai Sarana Pembelajaran Kediklatan	Poin
IKP 2 Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi SDM LHK	Orang	05 Jumlah SDM LHK di tingkat tapak yang kompeten	Orang	051 Pelatihan SDM LHK Non Aparatur yang Ditingkatkan	Orang
		06 Lulusan diklat aparatur LHK	Orang	051 Pelatihan Teknis dan Fungsional	Orang
				052 Pelatihan Administrasi	Orang
		08 Jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	Orang	051 Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK	Orang
IKP 4 Jumlah Lembaga / Komunitas Serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Orang	15 Jumlah SDM masyarakat yang terlatih, peduli dan berbudaya lingkungan	Orang	051 Pelatihan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Orang
IKP 5 Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Poin	16 Nilai SAKIP Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Poin	051 Penyusunan Rencana Program & Anggaran	Dokumen
				052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan
				053 Pengelolaan Kepegawaian	Layanan
				054 Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Layanan
				001 Gaji dan Tunjangan	Layanan
				002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan
				Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan

4.2. Target Kinerja

Target yang terdapat pada indikator kinerja kegiatan merupakan target yang akan dicapai oleh Balai Diklat LHK Makassar hingga Tahun 2024. Rincian besaran target IKK Balai Diklat LHK Makassar Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Target IKK Balai Diklat LHK Makassar Per Tahun

Target IKK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
01 Nilai KHDTK yang kelola	66,5 poin	67 poin	68 poin	69 poin	70 poin
05 Jumlah SDM LHK di tingkat tapak yang kompeten	364 orang	240 orang	<i>240 orang</i>	<i>240 orang</i>	<i>240 orang</i>
06 Lulusan diklat aparatur LHK	425 orang	120 orang	<i>120 orang</i>	<i>120 orang</i>	<i>120 orang</i>
08 Jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	-	180 orang	<i>180 orang</i>	<i>180 orang</i>	<i>180 orang</i>
15 Jumlah SDM masyarakat yang terlatih, peduli dan berbudaya lingkungan	150 orang	150 orang	<i>150 orang</i>	<i>150 orang</i>	<i>150 orang</i>
16 Nilai SAKIP Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM	72 poin	73 poin	74 poin	75 poin	76 poin

Untuk mencapai target pada Indikator Kinerja Kegiatan tersebut disusun komponen kegiatan dengan rincian target per tahun sebagai berikut.

Tabel 10. Target Komponen Kegiatan Balai Diklat LHK Makassar Per Tahun

IKK	Komponen Kegiatan	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
01 Nilai KHDTK yang kelola	051 Pengembangan KHDTK Sebagai Sarana Pembelajaran Kediklatan	Poin	66,5	67	68	69	70
05 Jumlah SDM LHK di tingkat tapak yang kompeten	051 Pelatihan SDM LHK Non Aparatur yang Ditingkatkan	Orang	364	240	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>

IKK	Komponen Kegiatan	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
06 Lulusan diklat aparatur LHK	051 Pelatihan Teknis dan Fungsional	Orang	425	120	90	120	90
	052 Pelatihan Administrasi		-	-	30	-	30
08 Jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	051 Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK	Orang	-	180	180	180	180
15 Jumlah SDM masyarakat yang terlatih, peduli dan berbudaya lingkungan	051 Pelatihan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Orang	150	150	150	150	150
16 Nilai SAKIP Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM	051 Penyusunan Rencana Program & Anggaran	Dokumen	4	4	4	4	4
	052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	4	4	4	4	4
	053 Pengelolaan Kepegawaian	Layanan	1	1	1	1	1
	054 Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Layanan	1	1	1	1	1
	001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	1	1	1
	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	1	1	1
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1

4.3. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka menunjang target pada kegiatan Balai Diklat LHK Makassar, rencana alokasi anggaran Balai Diklat LHK Makassar Tahun 2020 – 2024 adalah sebesar Rp. 78.666.800.000,00. Anggaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan pencapaian target dan kemampuan kelembagaan dan SDM

yang dimiliki. Pendanaan ini terbagi untuk memenuhi 13 komponen kegiatan, dengan rincian seperti pada tabel berikut.

Tabel 11. Rencana Alokasi Pembiayaan Balai Diklat LHK Makassar Tahun 2020 – 2024

No	Komponen Kegiatan	Alokasi Anggaran (Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	051 Pengembangan KHDTK Sebagai Sarana Pembelajaran Kediklatan	620	615,0	620	630	640
2	051 Pelatihan SDM LHK Non Aparatur yang Ditingkatkan	172,69	480	500	550	600
3	051 Pelatihan Teknis dan Fungsional	1.083,05	550	510	650	600
4	052 Pelatihan Administrasi	-	-	40	-	55
5	051 Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK	-	360	400	450	500
6	051 Pelatihan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	360	300	400	450	500
7	051 Penyusunan Rencana Program & Anggaran	39,293	158,49	150	160	160
8	052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	10,151	39,01	50	55	60
9	053 Pengelolaan Kepegawaian	6,733	31,5	40	45	50
10	054 Pelayanan Umum dan Perlengkapan	14,883	21,0	25	30	35
11	001 Gaji dan Tunjangan	8.032,632	7.450	8.450	8.450	8.450
12	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.947,368	3.500	3.500	3.500	3.500
13	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	351	769	1.000	1.500	2.000
Total Alokasi		14.637,8	14.274	15.685	16.920	17.150

Operasionalisasi seluruh kegiatan Balai Diklat LHK Makassar akan berjalan efektif apabila didukung oleh ketersediaan dan alokasi anggaran yang memadai. Sumber utama anggaran pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan diklat lingkungan hidup dan kehutanan berasal dari dana APBN.

Dengan kondisi penganggaran tersebut, menuntut penyusunan program anggaran yang perlu perbaikan dari tahun ke tahun baik dari sisi jumlah maupun strukturnya. Dengan kondisi tersebut, Balai Diklat LHK Makassar

melakukan antisipasi dengan pola perencanaan anggaran yang lebih fokus, kreatif, serta mendorong *stakeholders* untuk ikut terlibat dalam upaya peningkatan kapasitas SDM-nya melalui skema kerjasama diklat, baik pola *sharing* maupun swadana. Perencanaan program dan anggaran antar seksi atau sub bagian Balai Diklat LHK Makassar harus bersinergi.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Diklat LHK Makassar tahun 2020 -2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan P2SDM. Sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan yang berintegritas, memiliki etos kerja tinggi, dan semangat gotong royong merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sampai ke tingkat tapak.

Upaya untuk mewujudkan profesionalisme SDM lingkungan hidup dan kehutanan dalam mendukung akselerasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan merupakan suatu proses peningkatan secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Diklat sebagai suatu proses pembelajaran harus dipahami sebagai titik sentral dari mainstream pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, renstra juga memperhitungkan berbagai kecenderungan yang diprediksi akan terjadi di masa depan. Berhasilnya implementasi renstra sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan, upaya dan kerja keras yang sungguh-sungguh dari segenap unsur jajaran Balai Diklat LHK Makassar, serta dukungan dari unit eselon I di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana Strategis Balai Diklat LHK Makassar tahun 2020 – 2024 juga merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja lingkup Balai Diklat LHK Makassar. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seluruh elemen pelaksana kegiatan Balai Diklat LHK Makassar harus dapat bekerja secara optimal, efektif dan efisien.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Kinerja dan Pendanaan Program, Kegiatan dan Komponen Balai Diklat LHK Makassar Tahun 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Sasaran program/Indikator Kinerja Utama Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Komponen Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN														
Sasaran Strategis 4 – Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing														
	- IKU 13– Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan													
	- IKU 17– Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi													
	- IKU 19– Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK													
Program Dukungan Manajemen								186.480	188.457	195.434	199.335	208.591	BP2SDM	
Sasaran Program (outcome) 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima; 2. Meningkatnya Kompetensi SDM LHK.														
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM (5439)														
Sasaran Kegiatan - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada BP2SDM														
	- IKP- Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Poin	72	73	74	75	76							
	- IKK- Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Poin	72	73	74	75	76							
	Rincian Output- Layanan Dukungan Manajemen Satker							70,5	249,5	265	290	305	BDLHK Makassar	Makassar
	- Komponen 051- Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Dokumen	4	4	4	4	4	39	158	150	160	160		
	- Komponen 052-Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	4	4	4	4	4	10	39	50	55	60		
	- Komponen 053- Pengelolaan Kepegawaian	Layanan	1	1	1	1	1	6,7	31,5	40	45	50		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Sasaran program/Indikator Kinerja Utama Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Komponen Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	- Komponen 054- Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Layanan	1	1	1	1	1	14,8	21,0	25	30	35		
	Rincian Output- Layanan Perkantoran							11.980	10.950	11.950	11.950	11.950	BDLHK Makassar	Makassar
	- Komponen 001- Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	1	1	1	8.032, 6	7.450, 0	8.450	8.450	8.450		
	- Komponen 002- Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	1	1	1	3.947, 4	3.500, 0	3.500	3.500	3.500		
	Rincian Output- Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	351	769	1.000	1.500	2.000	BDLHK Makassar	Makassar
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi								66.000	85.600	95.400	106.400	118.500	BP2SDM	
Sasaran Program (Outcome) 1. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) / Hutan Diklat; 2. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK														
Kegiatan: Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK (5441)								51.046	91.868	94.068	96.368	98.668	Pusdiklat SDM LHK dan BDLHK	
Sasaran Kegiatan : 1. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) / Hutan Diklat 2. Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
	- IKP- Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK/Hutan Diklat	Poin	66,5	67	68	69	70							
	- IKK-Nilai KHDTK yang Dikelola	Poin	66,5	67	68	69	70							
	Rincian Output- Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat							620	615	620	630	640	BDLHK Makassar	Kab. Pangkep
	- Komponen 51- Pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan	Poin	66,5	67	68	69	70	620	615	620	630	640		
	- IKP-Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi SDM LHK	Orang	9782	10683	10683	10683	10683							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Sasaran program/Indikator Kinerja Utama Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Komponen Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	- IKK- Jumlah SDM LHK di tingkat tapak yang kompeten	Orang	2310	3210	3210	3210	3210							
	Rincian Output -Pelatihan SDM Non Aparatur yang ditingkatkan							173	480	500	550	600	BDLHK Makassar	Makassar
	- Komponen 051- Pelatihan SDM LHK Non Aparatur yang Ditingkatkan	Orang	364	240	240	240	240	173	480	500	550	600		
	- IKK - Lulusan diklat aparatur LHK	Orang	950	1251	1251	1251	1251							
	Rincian Output -Pelatihan Aparatur SDM LHK yang ditingkatkan							1.083	550	550	650	655	BDLHK Makassar	Makassar
	- Komponen 051- Pelatihan Teknis dan Fungsional	Orang	425	120	90	120	90	1.083	550	510	650	600		
	- Komponen 052- Pelatihan Administrasi	Orang	-	-	30	-	30	-	-	40	-	55		
	- IKK- Jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	Orang	7000	7000	7000	7000	7000							
	Rincian Output - Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha							-	360	400	450	500	BDLHK Makassar	Makassar
	- Komponen 051- Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK	Orang	-	180	180	180	180	-	360	400	450	500		
Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan (5443)								11.919	25.662	29.061	34.846	40.951	Puslatmas PGL & BDLHK	
Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dan Generasi Lingkungan Hidup														
	- IKP-Jumlah Lembaga/Komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup													
	- IKK - Jumlah SDM masyarakat yang terlatih, peduli dan berbudaya lingkungan	Orang	1530	4000	4000	4000	4000							
	Rincian Output - Pelatihan Masyarakat bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan							360	300	400	450	500	BDLHK Makassar	Makassar

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Sasaran program/Indikator Kinerja Utama Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Komponen Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	- Komponen 051- Pelatihan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Orang	150	150	150	150	150	360	300	400	450	500		